

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih besar terutama dalam pelaksanaannya. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung pada sumber daya manusianya. Artinya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sumber daya manusia atau aparatur pemerintah yang cakap dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Bangun(2012:4) “salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan adalah sumber daya manusia.” Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan. Hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membawa konsekuensi, yaitu adanya tuntutan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, aparatur pemerintah sebagai unsur pelaksana dalam organisasi pemerintah

daerah mempunyai peranan penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pengembangan pegawai dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan (Hasibuan, 2011:68). Mengingat kenyataan tersebut, pengembangan sumber daya manusia atau aparatur pemerintah harus diperhatikan untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang, maupun untuk menjawab tantangan masa depan.

Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara profesional, diharapkan pegawai dapat bekerja produktif dan memiliki kinerja yang tinggi. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, maka haruslah dijadikan tolok ukur suatu organisasi, karena manusia adalah aset organisasi yang paling menentukan keberhasilan sebagai pelaksana. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi dan harus dikembangkan. Hal ini bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang handal dan mampu bersaing dalam era globalisasi ini, selain itu juga untuk mencapai persyaratan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

Pengembangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam penyelenggaraan pemerintah serta melatih dan menjadikan aparatur pemerintah daerah untuk lebih profesional dan menjadi pelayan publik yang benar-benar melayani masyarakat dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun daerah. Oleh karena itu, pengembangan

aparatur tidak terlepas dari tujuan dan keinginan pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkulu.

Untuk membentuk aparatur pemerintah yang baik, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pengembangan.

Pengembangan adalah suatu keharusan dan suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan juga sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Karena dengan adanya pengembangan sumber daya aparatur pemerintah diharapkan semua permasalahan yang ada dalam suatu organisasi dapat terpecahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yaitu tujuan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadiannya dan etik pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi.

Setiap organisasi pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkulu selalunya menginginkan tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas dan cakap dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya.

Baik atau buruknya penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan tergantung pada kemampuan aparatur. Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Bengkayang mempunyai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS). Dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1.

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Tahun 2014

No	Kegiatan	Jumlah peserta
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 orang
2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	10 orang
3.	Rakornis Bidang Kediklatan	24 orang

Sumber : BKDD Kabupaten Bengkayang 2014, data diolah

Namun pada kenyataannya masih ditemui pegawai yang belum mengikuti pengembangan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Table 1.2.

Data pegawai yang sudah dan belum mengikuti pengembangan

No	Sudah	Belum	Jumlah Pegawai
1	13	24	37

Sumber : BKDD Kabupaten Bengkayang 2014, data diolah.

Berdasarkan data dari tabel di atas, menunjukkan bahwa masih ada pegawai yang belum mengikuti pengembangan yang berjumlah 24 orang. Hal tersebut berpengaruh pada kualitas sumber daya aparatur pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkayang. Mengingat semakin kompleksnya tugas pokok yang harus dilaksanakan,

makakebutuhanakanpengembangandirasakanperludansangatpentingperannya. Selainmasalahumundiatas, jugadisebabkanolehadanyamasalahlainsepertimasihbanyaknyatingkatpendidikanpegawai yang rendah.

Tabel 1.3.

Tingkat Pendidikan Pegawai BKDD

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	5
2	S1	12
3	DIII	11
4	SMA	9

Sumber: BKDD Kab.BengkayangTahun 2014, data diolah

Olehkarenaitu,pengembangansumber dayamanusiaharusdilakukansecaraterprogram,berkelanjutan dan merata untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuanberdasarkankebutuhanorganisasi, bukandidasarkanpadaunsursukaatautidakasukapimpinanbaikdalamhalpenempatanpegawai, diklat, maupunmutasi, danpromosijabatan.

Untuk itu, dirasa perlu untuk mempelajari lebih mendalam mengenai masalah pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkayang. Ini sebagai sebuah penelitian skripsi atau tugas akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.2.Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada “pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang”.

1.3. Rumusan Permasalahan

Suatu permasalahan timbul karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, apa yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014:285). Untuk memberikan kepastian mengenai permasalahan yang diteliti diperlukan suatu penelitian ilmiah mengenai pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkayang yang nantinya pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) dapat terlaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkayang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS).

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.
2. Bagi aparat pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan perannya dalam pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS).

3. Bagi pihak akademisi, sebagai wacana untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan (PNS) secara lebih mendalam.